

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Adapun kriteria komponen PKH terdiri atas: Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan sosial.

Rekomendasi adalah suatu proses komunikasi atas produk atau jasa tertentu yang berguna untuk memberikan informasi secara personal. Rekomendasi ini sangat penting artinya untuk meyakinkan orang lain bahwa sesuatu atau seseorang tepat dan layak

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pihak Kecamatan, Desa dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) membutuhkan sistem pendukung keputusan (SPK) untuk memprioritaskan masyarakat kurang mampu untuk menerima bantuan dari program tersebut.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem informasi interatif yang menyediakan informasi, pemodelan dan pemanipulasian data. Sistem itu digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam semiterstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, dimana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat

Pada saat melakukan riset di Kota Bukittinggi, penulis menemukan beberapa permasalahan. Adapun permasalahan yang paling dominan yaitu, penerima program PKH tidak merata masih banyak masyarakat yang tidak mampu atau miskin belum mendapatkan bantuan dari program ini dan masih ditemukan adanya kepesertaan yang tidak layak (masyarakat mampu) ternyata mendapatkan bantuan PKH.

Untuk mengatasi permasalahan dalam Pemberian PKH di Kota Bukittinggi, maka perlu dibangun suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan menerapkan metode perankingan yang dapat mempermudah menentukan warga yang layak menerima PKH dalam pemanfaatan beberapa metode untuk mencari alternatif solusi metode yang dipilih adalah menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) karena metode SAW lebih efisien dan waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan lebih singkat dan mudah.

Konsep dasar SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari kinerja setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode SAW ini sangat sederhana dan mudah dipahami serta bisa diimplementasikan pada sistem pendukung keputusan yang dibuat dengan memperhatikan bobot dan kriteria sehingga sistem lebih mudah dan efisien (Desember & Fauziah, 2019).

Penelitian ini menggunakan metode SAW karena merupakan salah satu metode penyelesaian multi kriteria, dimana dalam pemberian PKH mempunyai banyak kriteria yang harus dipertimbangkan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berupaya memecahkan hal tersebut dengan mengambil permasalahan yang

berjudul **“SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN KELUARGA HARAPAN KOTA BUKITTINGGI DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) MENGGUNAKAN PHP DAN DATABASE MYSQL”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW)?
2. Bagaimana implementasi metode *Simple Additive Weighting* (SAW) pada sistem pendukung keputusan penyeleksian penerima Program Keluarga Harapan (PKH)?
3. Bagaimana proses menghitung penyeleksian penerima Program Keluarga Harapan (PKH) didalam sistem pendukung keputusan?

1.3. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini diharapkan dapat membantu dalam penyeleksian penerima Program Keluarga Harapan (PKH) secara tepat, serta mendapatkan keputusan warga yang layak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) secara tepat dan akurat

2. Diharapkan dengan adanya sistem pendukung keputusan permasalahan yang ada di Kota Bukittinggi tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dapat terselesaikan dengan cepat dan akurat
3. Diharapkan dengan diterapkannya perancangan desain aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dalam proses pengolahan data keputusan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bukittinggi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat serta data yang telah diperhitungkan tersimpan baik dalam database MySQL

1.4. Batasan Masalah

Pada penelitian ini diperlukan batasan-batasan agar tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun batasan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Sistem pendukung keputusan yang akan dirancang dan dibangun adalah sistem pendukung keputusan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yang membantu memberikan alternatif terbaik dalam penyeleksian penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Penggunaan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menyeleksi alternatif terbaik agar diperoleh warga atau rumah tangga yang layak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Sistem pendukung keputusan penyeleksian penerima Program Keluarga Harapan (PKH) akan dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP serta MySQL sebagai database

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan sistem pendukung keputusan penyeleksian penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW).
2. Mengetahui hasil implementasi metode *Simple Additive Weighting* (SAW) pada sistem pendukung keputusan penyeleksian penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
3. Untuk menghasilkan sistem pendukung keputusan yang dibangun agar dapat mempermudah sebuah pengambilan keputusan yang tepat dan akurat

1.6. Manfaat Penelitian

Dari kutipan diatas,dapat diambil manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan,memperluas wawasan dan pengetahuan.
2. Menciptkana suatu sistem informasi yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh pihak yang terkait untuk pengolahan data secara akurat dan tepat.
3. Pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat dan akurat oleh pihak yang membutuhkan.
4. Bagi penulis sendiri penelitian ini sangat bermanfaat karena penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang lebih dalam mengenal permasalahan-permasalahan yang terjadi sekaligus dengan penyelesaiannya

1.7. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Bukittinggi merupakan salah satu Kota yang berada di Sumatera Barat. Wilayah Kota Bukittinggi terbagi ke dalam 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kecamatan Guguk Panjang, dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan jumlah RT 256, RW 187 sedangkan luas seluruh wilayah Kecamatan Sukaraja tersebut adalah 25,24 km².

Kota Bukittinggi berada di kaki Gunung Singgalang yang mempunyai ketinggian antara 500 – 1.300 meter di atas permukaan laut, bentuk wilayah Kota Bukittinggi terdapat di bagian utara, kemiringan antara 15 – 25 % terdapat dibagian tengah dan kemiringan 0 – 3 %. Iklim di Kota Bukittinggi masih dipengaruhi keadaan iklim secara regional wilayah Kota Bukittinggi yang beriklim tropis basah dengan curah hujannya sangat dipengaruhi oleh angin Muson yang bertiup dari daratan Australia dan Asia. Keadaan curah hujan di Kota Bukittinggi setiap tahunnya rata rata sebesar 1.204 mm pertahun. Banyaknya hari hujan setiap tahunnya adalah 81 hari dan suhu udara berkisar antara 21 C – 25 C.

Secara administrasi wilayah tersebut dibatasi oleh

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Tiltang Agam
- Sebelah Selatan dengan Banuhampu Sungai Puar
- Sebelah Barat dengan IV Koto
- Sebelah Timur dengan IV Angkat Candung

2. Sekretariat
 - a. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan
 - b. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset
 - c. Pengkoordinasian perencanaan serta pelaporan program dan kegiatan di lingkup dinas.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
 - b. Penyusunan rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;
 - c. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian.
4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - a. Melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan keuangan Dinas.
 - b. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas.
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
5. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.

- b. Penyusunan rencana kerjarehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. Penetapan petunjuk teknis penyelenggaraan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
6. Seksi Rehabilitasi Sosial
- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, tuna susila, orang dengan HIV AIDS, korban Napza, waria, orang dengan ketelantaran melalui pendampingan, bimbingan, asistensi, pemulihan, pemulangan, rujukan panti/ non panti/ lembaga/ balai.
 - b. Melaksanakan program dan kegiatan rehabilitasi sosial melalui pendampingan, bimbingan, asistensi, pemulihan, aksesibilitas, rujukan panti/non panti/ lembaga/ balai.
 - c. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, eks psikotik, mental dan sensorik melalui pendampingan, bimbingan, asistensi, pemulihan, aksesibilitas, rujukan panti/non panti/ lembaga/ balai.
7. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga yang beresiko sosial melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan atau bantuan hukum.
 - b. Melaksanakan program dan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga yang beresiko sosial melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan atau bantuan hukum;

- c. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga yang beresiko sosial melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan atau bantuan hukum;